

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Kota Kupang berhasil menyerap anggaran belanja dengan baik. Hal ini dapat terjadi ketika pemerintah daerah memiliki sistem administrasi yang baik, kebijakan yang efektif dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan program-program yang direncanakan. Peningkatan penyerapan anggaran ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kota Kupang.
2. Perencanaan anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang dan Jasa Berpengaruh secara parsial terhadap Penyerapan Anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($0,001 < 0,05$).
3. Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang dan jasa Berpengaruh secara simultan terhadap Penyerapan anggaran di Badan Keuangan dan Aset Kota Kupang dengan nilai signifikansi 0,000 ($0,000 < 0,05$).

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang harus lebih memperhatikan analisis kebutuhan secara mendalam, evaluasi kebutuhan terhadap tenaga kerja, proses pengadaan barang dan jasa yang transparan agar dapat meningkatkan program-program kerja yang sudah direncanakan.
2. Lebih melibatkan semua unit kerja dalam melakukan penyusunan program-program yang menjadi rencana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang karena dengan melibatkan berbagai departemen atau divisi dapat membantu mengurangi risiko tumpang tindih anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Selain itu, harus adanya proses yang transparansi dalam pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem yang dapat memastikan persaingan yang sehat antara pemasok, sehingga harga dan kualitas barang atau jasa yang diperoleh menjadi optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. (2011). Menyoal Penyerapan Anggaran. Yogyakarta: Paris Review.
- Carlin, T. Putri. (2014). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Skripsi. Bengkulu: Universitas Bengkulu. <http://repository.unib.ac.id/id/eprint/8077> .
- Elim, M. A., Ndaparoka, D. S., & Tomasowa, T. E. D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Audit*, 3(2), 46–56.
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 8(1), 108–117. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330>
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss Edisi Kesembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasni, N. T., & Basukianto. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. *Telaan Manajemen*, 13, 33-34.
- Hidayat, A. S., & Nalle, F. W. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010- 2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 71. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i1.4647>
- Kennedy., Azlina, N., & Kisman, Z. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 13(2), 108-117.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putri, K. M. R., Yuniarta, G. A., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada SKPD di Wilayah

Pemerintah Daerah Provinsi Bali). Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Assets, 8(1), 120–132.

Rahmawati, Rika Septi., Ishak, Jouzar Farouq. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, Vol. 1, No. 1, October 2020, Hal. 180-189.

Rahmawati., Amir, A., & Junaidi. (2021). Evaluasi Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Manajemen Sebagai Pemoderasi Pada Satuan Kerja Kementerian Agama RI di Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomi*, 16(1).

Ramadhani, R., Setiawan, A. M. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710-726. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/104> .

Ramadhani, R., Setiawan, A. M. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710-726.

Rifai, A., Inapty, B. A., & Pancawati M., R. S. (2016). ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERLAMBATAN DAYA SERAP ANGGARAN (Studi Empiris Pada SKPD Pemprov NTB). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1–10. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i01.p01>

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarah, Fitri, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Wilayah KPPN I di Kota Bandung, Master Thesis, Akuntansi., Universitas Pendidikan Indonesia., 2016

Undang Undang nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Desentralisasi)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Yuniriza., Hasan, A., & Rasuli, M. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran PNBK Kegiatan Pengamanan Objek Vital Pada Satker Jajaran Polda Riau. *Jurnal Ekonomi*, 27(4), 409-423.